

# STATISTIK KEUANGAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018-2019



# **STATISTIK KEUANGAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018-2019**





# **Statistik Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2018-2019**

*Regional Financial Statistics of Daerah Istimewa Yogyakarta Province 2018-2019*

**ISSN :** 2598-2664

**No. Publikasi/Publication Number:** 34540.2002

**Katalog/Catalog:** 7203007.34

**Ukuran Buku/Book Size:** 21 x 29,7 cm

**Jumlah Halaman/Number of Pages:** xii + 76 halaman/pages

**Naskah/Manuscript:**

Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi DI Yogyakarta

*Division of Distribution Statistics of BPS-Statistics D.I. Yogyakarta Province*

**Penyunting/Editor:**

Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi DI Yogyakarta

*Division of Distribution Statistics of BPS-Statistics D.I. Yogyakarta Province*

**Desain Kover oleh/Cover Designed by:**

Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi DI Yogyakarta

*Division of Distribution Statistics of BPS-Statistics D.I. Yogyakarta Province*

**Penerbit/Published by:**

BPS Provinsi DI Yogyakarta/BPS-Statistics DI Yogyakarta Province

**Pencetak/Printed by:**

-

**Sumber Ilustrasi/Graphics by:** -

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

*Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part of all this book for commercial purpose without permission from BPS-Statistics Indonesia*



**Tim Penyusun**

**STATISTIK KEUANGAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2018-2019**

**Pengarah :**

Dr. Heru Margono, M.Sc.

**Penanggung Jawab Teknis:**

Amirudin,S.Si, MMSI.

**Editor :**

Chatarina Budi Anggarini, S.ST, M.M.

**Penulis :**

Sudiyana, S.E, M.M.

**Pengolah Data :**

Sudiyana, S.E, M.M.

**Desain/Layout :**

Sudiyana, S.E, M.M.



## KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2018-2019 merupakan kelanjutan dari publikasi tahun sebelumnya yang secara teratur telah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Publikasi ini menyajikan data mengenai Realisasi APBD 2018 dan APBD 2019 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tujuan publikasi ini untuk memenuhi kebutuhan konsumen data, khususnya data mengenai keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada bab penjelasan umum diterangkan perihal ruang lingkup data yang dirilis serta konsep dan definisi. Sedangkan pada bab ulasan dikupas tentang tabel-tabel realisasi seperti: APBD, PAD, dan DAU baik nominal maupun persentase untuk tahun 2018, namun tabel-tabel untuk tahun 2019 merupakan data rencana APBD.

Demi perbaikan publikasi di masa mendatang, maka tanggapan dan saran-saran dari pengguna data sangat diharapkan. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan hingga selesainya publikasi ini, diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, April 2020

Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



Dr. Heru Margono, M.Sc.



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>I. PENJELASAN UMUM .....</b>	<b>3</b>
1.1. Pendahuluan .....	3
1.2. Ruang Lingkup .....	4
1.3. Konsep dan Definisi .....	4
<b>II. ULASAN RINGKAS .....</b>	<b>11</b>

### Tabel-Tabel

1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2018 .....	12
2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Persentasenya terhadap Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2018 ..	14
3. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2014-2018.....	15
4. Rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Persentasenya terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2019 .....	16
5. Dasar Perimbangan Keuangan dan Bagian Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.....	17
6. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Persentasenya terhadap Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2018 ..	18
7. Persentase Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2014-2018	19
8. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Persentasenya terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2019.....	20
9. Jumlah dan Persentase Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2018 .....	21

10. Persentase Belanja Tidak Langsung Terhadap Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2014- 2018.....	22
11. Rencana Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2019 .....	23
12. Persentase Realisasi Belanja Menurut Fungsinya di Daerah Istimewa Yogyakarta 2018 .....	24
13. Persentase Rencana Belanja Menurut Fungsinya di Daerah Istimewa Yogyakarta 2019 .....	25

### **Lampiran Tabel**

1.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2018 (000 Rp).....	29
1.2. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2018 (000Rp) .....	30
1.3. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2018 (000 Rp)	31
1.4. Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2018 (000Rp) .....	32
1.5. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2019 (000 Rp).....	33
1.6. Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2019 (000 Rp) .....	34
1.7. Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2019 (000 Rp). ....	35
1.8. Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2019 (000 Rp).....	36
2.1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2018 (000 Rp).....	37
2.2. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2018 (000 Rp)	38
2.3. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2018 (000 Rp).....	39
2.4. Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2018 (000 Rp) .....	40
2.5. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 (000 Rp) .....	41
2.6. Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2019 (000 Rp).....	42

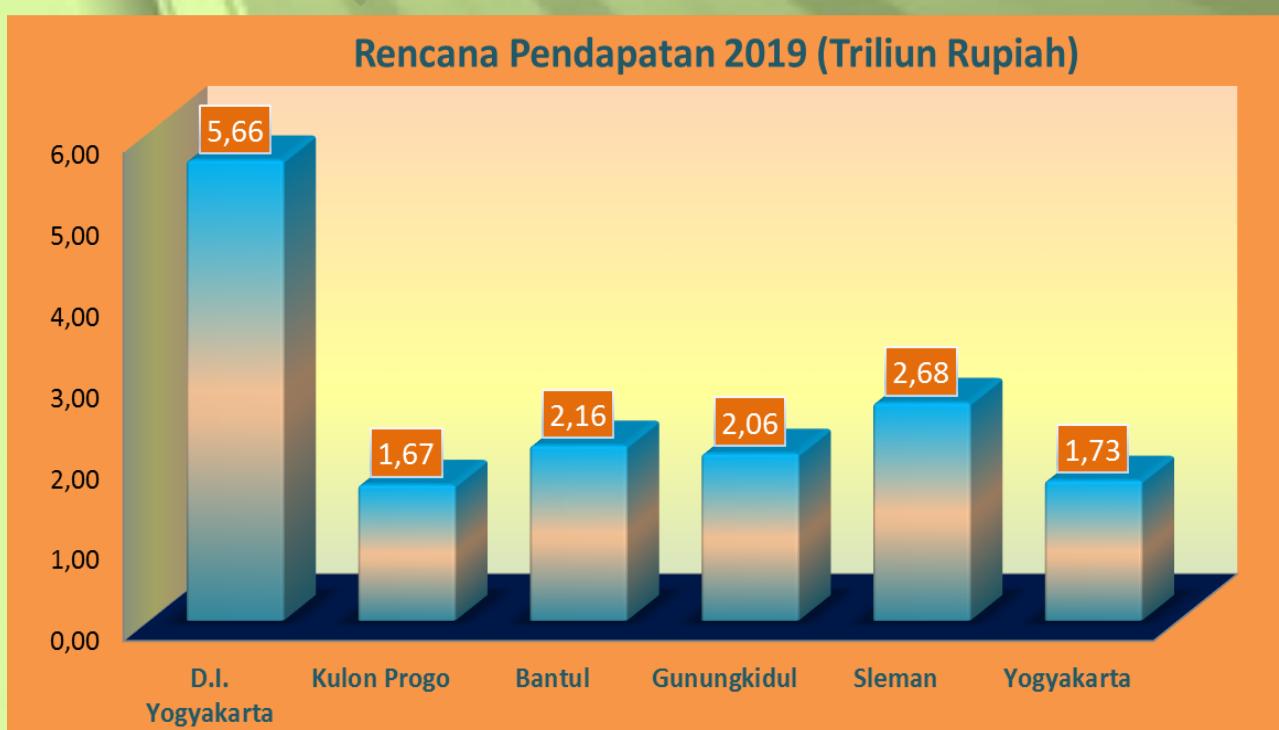
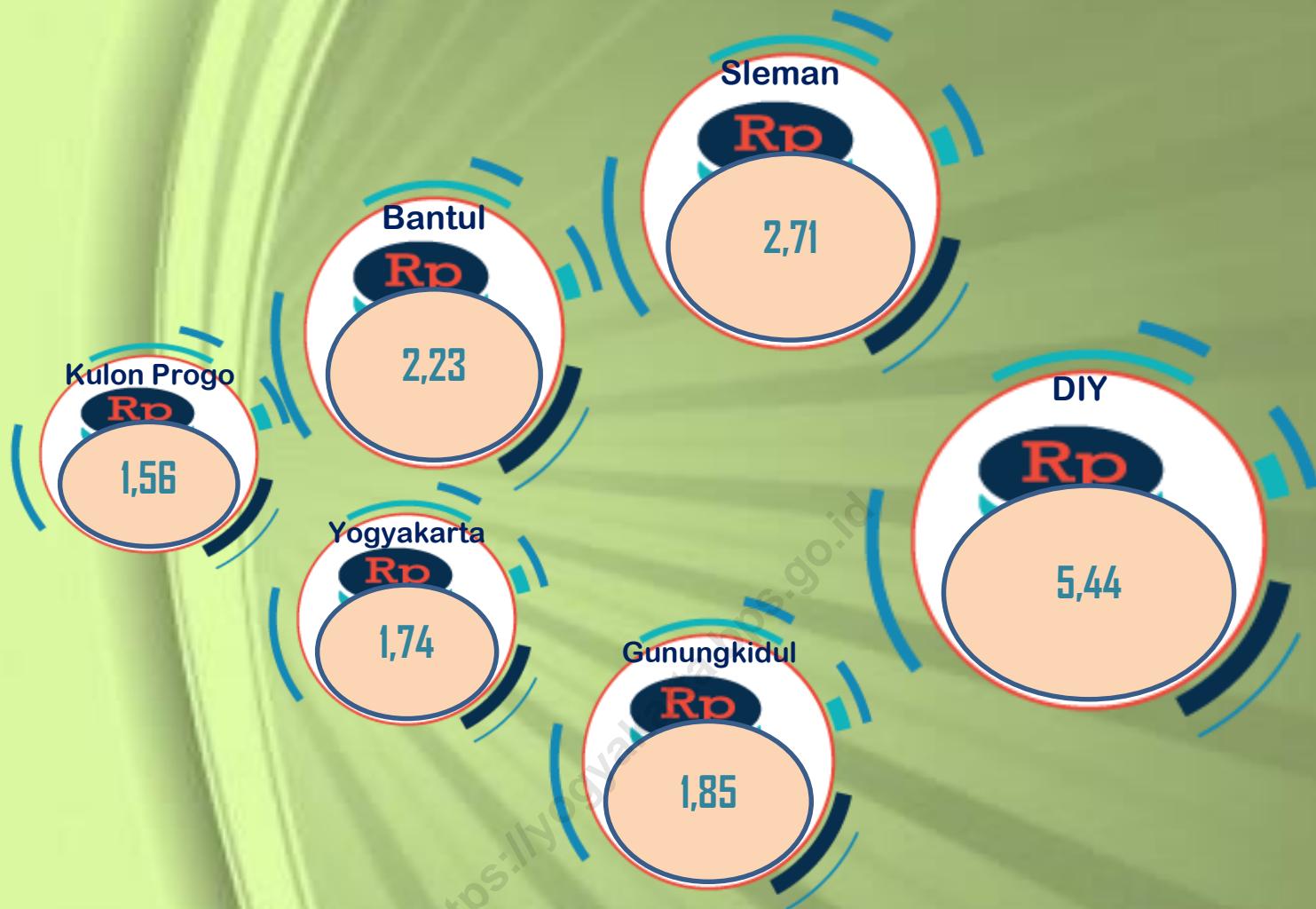
2.7. Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2019 (000Rp.) .....	43
2.8. Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2019 (000Rp.) .....	44
3.1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul 2018 (000 Rp).....	45
3.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul 2018 (000 Rp) .....	46
3.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul 2018 (000 Rp) .....	47
3.4 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Bantul 2018 (000 Rp).....	48
3.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul 2019 (000 Rp). ....	49
3.6 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul 2019 (000 Rp) .....	50
3.7 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul 2019 (000 Rp)..	51
3.8 Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Bantul 2019 (000 Rp)..	52
4.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 (000 Rp) .....	53
4.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2018 (000 Rp)..	54
4.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2018 (000Rp) .....	55
4.4 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2018 (000Rp).....	56
4.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2019 (000 Rp).....	57
4.6 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2019 (000 Rp). ....	58
4.7 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2019 (000Rp).....	59
4.8 Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2019 (000Rp).....	60
5.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman 2018 (000 Rp). ....	61

5.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman 2018 (000 Rp) .....	62
5.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman 2018 (000 Rp) .....	63
5.4 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Sleman 2018 (000 Rp).....	64
5.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2019 (000 Rp). ....	65
5.6 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman 2019 (000Rp). ....	66
5.7 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman 2019 (000 Rp). ....	67
5.8 Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Sleman 2019 (000 Rp). ....	68
6.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta 2018 (000 Rp).....	69
6.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta 2018 (000 Rp)	70
6.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta 2018 (000 Rp) .....	71
6.4 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kota Yogyakarta 2018 (000 Rp) .....	72
6.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta 2019 (000 Rp).....	73
6.6 Rencana anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta 2019 (000 Rp)	74
6.7 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta 2019 (000 Rp).....	75
6.8 Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kota Yogyakarta 2019 (000 Rp).....	76

## **Gambar- Gambar**

1. Komposisi Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2018 (persen). .....	15
2. Komposisi Realisasi Belanja Menurut Belanja Langsung dan Tidak Langsung di Daerah Istimewa Yogyakarta 2018 (persen). .....	21

# Realisasi Pendapatan Daerah 2018 (Triliun Rupiah)





## **I. PENJELASAN UMUM**

### **I.1. Pendahuluan**

Peranan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan wilayahnya terus diusahakan untuk lebih meningkatkan keselarasan dan kesinambungan dengan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab.

Pemerintah daerah terus berupaya untuk mendapatkan dan meningkatkan serta menggali sumber-sumber potensi daerah. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah pemerintah daerah melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu data statistik mengenai keuangan daerah menjadi semakin diperlukan dalam rangka keperluan kelengkapan informasi tentang keuangan negara, analisis dan pengambilan keputusan. Kegunaan data keuangan daerah antara lain :

1. Sebagai bahan dalam penyusunan neraca ekonomi secara makro seperti pendapatan regional, tabel input output, dan neraca arus dana.
2. Memberikan informasi tentang realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Untuk mengetahui potensi dan peranan sumber dana dari masing-masing daerah.
4. Sebagai informasi bagi pemerintah pusat, untuk menentukan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk daerah.

## **I.2. Ruang Lingkup**

Pengumpulan data statistik keuangan daerah dibedakan antara lain :

1. Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi.

Data Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi bersumber dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Data Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dikumpulkan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **I.3. Konsep dan Definisi**

### **I.3.1. Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah merupakan semua penerimaan uang melalui kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri dari:

#### **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

##### **1.1. Pajak Daerah**

Adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Penerimaan pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain.

## **1.2. Retribusi Daerah**

Yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi dalam tiga bagian yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Contoh retribusi jasa umum antara lain pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, dan lain-lain. Contoh retribusi jasa usaha antara lain pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan atau pertokoan, penjualan produksi usaha daerah, dan lain-lain. Contoh retribusi perijinan tertentu antara lain izin mendirikan bangunan, izin trayek, dan lain-lain.

## **1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya serta bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

## **1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah**

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, dan lain-lain.

## **2. Dana Perimbangan**

Adalah dana yang bersumber dari pemerintah pusat (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan ini terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

## **2.1. Bagi Hasil Pajak.**

Bagi hasil pajak terdiri dari bagian penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh pasal 21 orang pribadi, dan lain-lain.

## **2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam.**

Pendapatan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam berasal dari pendapatan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

## **2.3. Dana Alokasi Umum.**

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

## **2.4. Dana Alokasi Khusus.**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum.
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

### **3. Lain-lain Pendapatan yang Sah**

Adalah penerimaan dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Penerimaan lainnya terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta dana bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

#### **I.3.2 Belanja Daerah**

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi equitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah terdiri dari:

##### **1. Belanja Tak Langsung**

Belanja tak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Kelompok belanja tak langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dan Belanja Tidak Terduga.

##### **2. Belanja Langsung**

Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan.

Belanja langsung meliputi :

- Belanja Pegawai.
- Belanja Barang dan Jasa.
- Belanja Modal.



# ULASAN





## II. ULASAN RINGKAS

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Pemberian wewenang ini diwujudkan dengan pengaturan pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Prinsip dasar pemberian otonomi didasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Atas dasar pertimbangan ini, maka pemberian otonomi diharapkan akan lebih mampu memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa, dan peran aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal.

Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan dengan memenuhi azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pertambuan. Penyelenggaraan tugas-tugas desentralisasi semakin berkembang sejalan dengan tuntutan pelaksanaan tugas pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Agar daerah dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka perlu memiliki sumber pembiayaan yang cukup. Wujud otonomi daerah dengan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab menuntut pemerintah daerah agar dapat meningkatkan penerimaan dan mengoptimalkan pengeluaran.

Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Selanjutnya, berkaitan dengan hakekat otonomi daerah yaitu yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat

dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data statistik keuangan daerah dapat memberikan gambaran perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran serta analisanya yang merupakan informasi penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan melihat kemampuan atau tingkat kemandirian daerah.

Pada Tabel.1 dapat dilihat realisasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018.

**Tabel 1**  
**Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah**  
**di Daerah Istimewa Yogyakarta 2018**

Pemerintah Daerah	Realisasi Pendapatan (Juta Rp.)	Realisasi Belanja (Juta Rp.)	Ratio Pendapatan terhadap Belanja	Surplus/Defisit (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
D.I.Yogyakarta	5.443.552	5.303.451	1,03	2,57
Kab. Kulon Progo	1.559.832	1.481.008	1,05	5,05
Kab. Bantul	2.227.752	2.165.652	1,03	2,79
Kab. Gunungkidul	1.851.210	1.772.887	1,04	4,23
Kab. Sleman	2.712.794	2.580.094	1,05	4,89
Kota Yogyakarta	1.736.920	1.652.728	1,05	4,85

Dari tabel tersebut dapat kita ketahui, bahwa rasio pendapatan/penerimaan daerah terhadap belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta semuanya mengalami surplus anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan yang diperoleh pada tahun 2018 sudah dapat mencukupi kebutuhan belanja daerah.

Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta pada tahun 2018 memperoleh pendapatan/penerimaan sebesar 5,443 triliun rupiah dengan total pembelanjaan mencapai 5,303 triliun rupiah. Dengan demikian pada tahun 2018 Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta mengalami surplus keuangan sebesar 140,101 miliar rupiah atau 2,57 %.

Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Sleman merupakan kabupaten yang memperoleh pendapatan/penerimaan keuangan terbesar diantara kabupaten/kota lainnya yaitu mencapai nilai 2,712 triliun rupiah. Dengan belanja sebesar 2,580 triliun rupiah Kabupaten Sleman mengalami surplus anggaran sebesar 132 miliar rupiah. Kabupaten Kulon Progo mempunyai pendapatan paling kecil yaitu sebesar 1,559 triliun, namun merupakan kabupaten dengan surplus terbesar yaitu 5,05 persen atau sebesar 78 miliar rupiah dari total belanja sebesar 1,481 triliun.

Salah satu syarat yang diperlukan (*necessary condition*) untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah sebagaimana uraian sebelumnya, adalah tersedianya sumber-sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan pemerintah daerah tersebut telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu disamping sumber pembiayaan dari pemerintah diatasnya (berupa dana perimbangan) juga sumber pembiayaan dari dalam sendiri.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi, adalah daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dari pendapatan keuangan daerah. Pengelolaan PAD yang baik adalah pengelolaan PAD yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan, tanpa mengurangi alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber penerimaan daerah yang dimasukkan dalam pos Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Lain-lain PAD yang sah

Jenis-jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Berbeda dengan pemerintah provinsi, jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota yaitu :

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C
- Pajak Parkir

Besarnya persentase PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan besarnya sumbangan PAD daerah terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar persentase PAD terhadap total pendapatan maupun terhadap total belanja, menunjukkan bahwa daerah mampu untuk mencukupi belanja daerah sendiri. Sumbangan PAD terhadap total pendapatan ataupun terhadap total belanja tahun 2018, sebagai berikut:

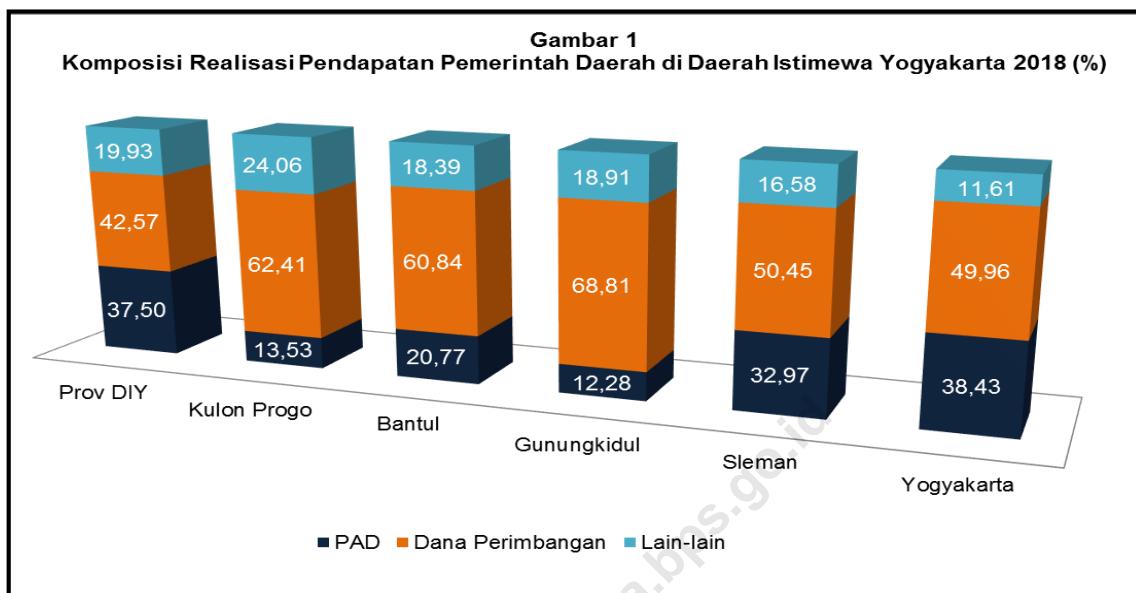
**Tabel 2  
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Persentasenya terhadap Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2018**

Pemerintah Daerah	Realisasi Pendapatan (Juta Rp.)	Realisasi Belanja (Juta Rp.)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Juta Rp.)	PAD thd Pendapatan (%)	PAD thd Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D.I. Yogyakarta	5.443.552	5.303.451	2.041.096	37,50	38,49
Kab. Kulon Progo	1.559.832	1.481.008	211.048	13,53	14,25
Kab. Bantul	2.227.752	2.165.652	462.654	20,77	21,36
Kab. Gunungkidul	1.851.210	1.772.887	227.300	12,28	12,82
Kab. Sleman	2.712.794	2.580.094	894.273	32,97	34,66
Kota Yogyakarta	1.736.920	1.652.728	667.493	38,43	40,39

Besaran sumbangan PAD terhadap pendapatan pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2018 cukup bervariasi. Dari lima kabupaten/ kota di D.I.Yogyakarta, Kota Yogyakarta merupakan kabupaten/kota yang mempunyai persentase PAD terbesar, yaitu mencapai 38,43 persen dari realisasi pendapatannya, disusul kemudian oleh Kabupaten Sleman dengan 32,97 persen. Kabupaten/kota dengan persentase PAD terhadap pendapatan yang terendah adalah Kabupaten Gunungkidul,

yaitu 12,28 persen. Sementara itu persentase PAD Pemerintah Provinsi D.I.Yogyakarta cukup besar yaitu mencapai 37,50 persen terhadap realisasi pendapatannya.

Komposisi realisasi pendapatan untuk masing-masing pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota Tahun 2018 dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini.



**Tabel 3**  
**Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2014 – 2018**

Pemerintah Daerah	2014	2015	2016	2017	2018	Perkembangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
D.I.Yogyakarta	46,65	46,86	42,93	36,42	37,50	-19,62
Kab. Kulon Progo	14,16	13,92	13,27	17,52	13,53	-4,45
Kab. Bantul	19,70	20,02	20,22	23,68	20,77	5,42
Kab. Gunungkidul	11,60	12,26	12,47	14,69	12,28	5,85
Kab. Sleman	27,61	28,03	30,79	31,57	32,97	19,40
Kota Yogyakarta	32,24	35,60	34,26	39,62	38,43	19,20

Dalam 5 tahun terakhir secara umum terdapat perubahan yang signifikan persentase PAD terhadap realisasi pendapatan di 5 kabupaten/kota. Persentase PAD terhadap total pendapatan terbesar yaitu di Kabupaten Sleman sebesar 19,40% persen, dari 27,61 persen pada Tahun 2014 menjadi 32,97 persen pada Tahun 2018. Persentase PAD terhadap realisasi pendapatan di Kabupaten Kulon Progo mengalami penurunan sebesar 4,45 %, yaitu dari 14,16 persen pada Tahun 2014 menjadi 13,53 persen pada

Tahun 2018. Sementara untuk Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir sebesar 19,62 %, yaitu dari 46,65 persen menjadi 37,50 persen.

Pada tabel 4 di bawah ini, dapat diketahui persentase besarnya rencana pendapatan asli daerah terhadap rencana pendapatan dan rencana belanja, hal ini dilakukan untuk memacu peningkatan pendapatan, dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

**Tabel 4**  
**Rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Persentasenya terhadap**  
**Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah**  
**di Daerah Istimewa Yogyakarta 2019**

Pemerintah Daerah	Rencana Pendapatan (Juta Rp.)	Rencana Belanja (Juta Rp.)	Rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Juta Rp.)	PAD thd Rencana Pendapatan (%)	PAD thd Rencana Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D.I. Yogyakarta	5.663.779	5.968.673	1.921.565	33,93	32,19
Kab. Kulon Progo	1.674.616	1.711.751	226.191	13,51	13,21
Kab. Bantul	2.156.590	2.383.358	448.854	20,81	18,83
Kab. Gunungkidul	2.057.526	2.271.334	228.329	11,10	10,05
Kab. Sleman	2.682.186	2.800.885	867.643	32,35	30,98
Kota Yogyakarta	1.725.609	1.856.017	636.084	36,86	34,27

Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah harus diarahkan pada usaha yang terus menerus dan berkelanjutan agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat, sehingga akan memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut, pada dasarnya dapat ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi pendapatan asli daerah adalah suatu tindakan atau usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti. Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru. Namun dalam rangka ekstensifikasi khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pokok nasional dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan investasi daerah.

**Tabel 5**  
**Dasar Perimbangan Keuangan dan Bagian Daerah menurut**  
**Undang-undang nomor 33 Tahun 2004**

Jenis Pungutan	Pemerintah (%)	Provinsi Bersangkutan (%)	Kabupaten /kota Penghasil (%)	Kabupaten /Kota Lain dan Provinsi Bersangkutan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. PBB <sup>1)</sup>	10,0	16,2	64,8	0,0
2. BPHTB	20,0	16,0	64,0	0,0
3. PPh pasal 25, pasal 29 dan PPh pasal 21	80,0	8,0	12,0	0,0
4. Kehutanan				
a. IHPH/IHH	20,0	16,0	64,0	0,0
b. Provisi Sumber Daya Hutan	20,0	16,0	32,0	32,0
c. Reboisasi	60,0	0,0	40,0	0,0
5. Pertambangan Umum				
a. Land-Rent (Iuran Tetap)	20,0	16,0	64,0	0,0
b. Royalty iuran Eksplorasi	20,0	16,0	32,0	32,0
6. Perikanan <sup>2)</sup>	20,0	0,0	0,0	0,0
7. Minyak Bumi	84,5	3,1	6,2	6,2
8. Gas Bumi	69,5	6,1	12,2	12,2
9. Panas Bumi	20,0	16,0	32,0	32,0

Catatan :

<sup>1)</sup> 9 % untuk biaya pemungutan

<sup>2)</sup> 80% untuk seluruh kabupaten/kota

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber penerimaan daerah selain dari PAD juga berasal dari Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, serta Lain-lain Penerimaan yang Sah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan bukan pajak. Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Sedangkan dana bagi hasil bukan pajak bersumber dari sumber daya alam (kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi). Dasar perolehan dana perimbangan dapat dilihat pada tabel 5.

Sumber pendapatan lain yang sangat berperan sampai sekarang adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dua puluh enam persen (26%) dari penerimaan APBN (penerimaan dari minyak dan gas, penerimaan pajak serta penerimaan dari non-migas dan non-pajak) dialokasikan untuk DAU. Sepuluh persen (10%) DAU dibagi ke provinsi, dan sembilan puluh persen (90%) dibagi ke kabupaten/kota.

Alokasi DAU tergantung dari bobot (tolok ukur) daerah. Penentuan Tolok Ukur (Bobot) didasarkan pada kebutuhan wilayah otonomi daerah paling sedikit dapat dicerminkan dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografi, dan tingkat pendapatan masyarakat dengan memperhatikan kelompok masyarakat miskin, yang selanjutnya berkembang menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu juga didasarkan pada Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah terhadap daerah lain. Potensi ekonomi daerah yang antara lain dapat dicerminkan dari potensi penerimaan yang diterima daerah seperti potensi industri, sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga menjadi tolok ukur penentuan DAU.

**Tabel 6**  
**Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Persentasenya terhadap Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2018**

Pemerintah Daerah	Realisasi Pendapatan (Juta Rp.)	Realisasi Belanja (Juta Rp.)	Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) (Juta Rp.)	DAU thd Pendapatan (%)	DAU thd Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D.I. Yogyakarta	5.443.552	5.303.451	1.314.262	24,14	24,78
Kab. Kulon Progo	1.559.832	1.481.008	705.869	45,25	47,66
Kab. Bantul	2.227.752	2.165.652	982.251	44,09	45,36
Kab. Gunungkidul	1.851.210	1.772.887	938.221	50,68	52,92
Kab. Sleman	2.712.794	2.580.094	996.492	36,73	38,62
Kota Yogyakarta	1.736.920	1.652.728	658.504	37,91	39,84

DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. Pada dasarnya, dengan diberlakukannya otonomi daerah, diharapkan ketergantungan daerah pada pusat tentang keuangan daerah diharapkan semakin kecil.

Pada tahun 2018 besarnya DAU yang dialokasikan ke Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta sebesar 1,314 triliun rupiah atau mencapai 24,14 persen dari pendapatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Besaran ini mampu mencukupi 24,78 persen dari belanja Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta.

Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi D.I.Yogyakarta yang memiliki persentase DAU terhadap realisasi pendapatannya terendah adalah Kabupaten Sleman dengan 36,73 persen, diikuti Kota Yogyakarta sebesar 37,91 persen. Sedangkan Kabupaten Gunungkidul memiliki persentase DAU terhadap realisasi pendapatannya tertinggi yaitu mencapai 50,68 persen.

Pada tabel 7 di bawah ini dapat dilihat besarnya persentase dana alokasi umum terhadap pendapatan asli pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta lima tahun terakhir yaitu dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018. Secara umum terjadi penurunan persentase besarnya dana alokasi umum terhadap pendapatan pemerintah daerah, hal ini menunjukkan adanya keberhasilan usaha pemerintah daerah dalam mengurangi ketergantungan keuangan dari pusat.

**Tabel 7**  
**Persentase Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap**  
**Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah**  
**di Daerah Istimewa Yogyakarta 2014 - 2018**

Pemerintah Daerah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D.I. Yogyakarta	28,66	27,07	24,13	25,85	24,14
Kab. Kulon Progo	57,07	53,55	52,91	49,53	45,25
Kab. Bantul	52,33	48,32	49,98	47,07	44,09
Kab. Gunungkidul	61,72	54,57	57,73	50,79	50,68
Kab. Sleman	45,84	42,90	43,55	38,10	36,73
Kota Yogyakarta	42,39	43,40	42,49	39,71	37,91

Persentase dana alokasi umum (DAU) terhadap rencana anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se- Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 8. Dari tabel di bawah ini bahwa secara umum DAU juga semakin kecil dari total belanja yang direncanakan oleh pemerintah daerah.

**Tabel 8**  
**Dana Alokasi Umum (DAU) dan Persentasenya terhadap**  
**Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah**  
**di Daerah Istimewa Yogyakarta 2019**

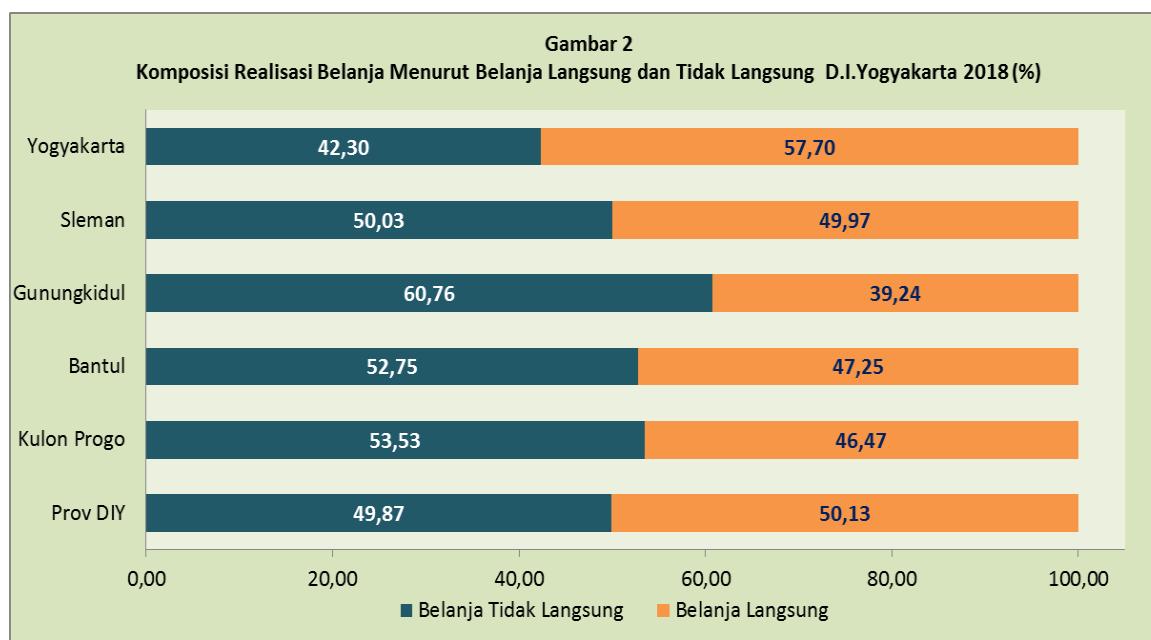
Pemerintah Daerah	Rencana Pendapatan (Juta Rp.)	Rencana Belanja (Juta Rp.)	Rencana Dana Alokasi Umum (DAU) (Juta Rp.)	DAU thd Rencana Pendapatan (%)	DAU thd Rencana Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D.I. Yogyakarta	5.663.779	5.968.673	1.351.102	23,86	22,64
Kab. Kulon Progo	1.674.616	1.711.751	727.020	43,41	42,47
Kab. Bantul	2.156.590	2.383.358	1.009.528	46,81	42,36
Kab. Gunungkidul	2.057.526	2.271.334	965.080	46,90	42,49
Kab. Sleman	2.682.186	2.800.885	1.026.081	38,26	36,63
Kota Yogyakarta	1.725.609	1.856.017	691.458	40,07	37,25

Belanja daerah dibedakan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Berpedoman pada prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota. Sesuai Peraturan Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung.

**Tabel 9**  
**Jumlah dan Persentase Realisasi Belanja Tidak Langsung dan**  
**Belanja Langsung Pemerintah Daerah**  
**di Daerah Istimewa Yogyakarta 2018**

Pemerintah Daerah	Belanja Tidak Langsung (Juta Rp.)	Persentase terhadap Total Belanja Daerah	Belanja Langsung (Juta Rp.)	Persentase terhadap Total Belanja Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
D.I.Yogyakarta	2.644.923	49,87	2.658.528	50,13
Kab. Kulon Progo	792.780	53,53	688.228	46,47
Kab. Bantul	1.142.423	52,75	1.023.229	47,25
Kab. Gunungkidul	1.077.273	60,76	695.615	39,24
Kab. Sleman	1.290.868	50,03	1.289.226	49,97
Kota Yogyakarta	699.176	42,30	953.552	57,70

Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta selama tahun 2018 menghabiskan dana 2,644 triliun rupiah (49,87 persen dari total belanja) untuk belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Secara umum persentase pos pembelanjaan daerah pemerintah kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta masih digunakan untuk pos belanja tidak langsung, kecuali Kota Yogyakarta.



Kota Yogyakarta mempunyai proporsi belanja tidak langsung yang paling rendah diantara kabupaten/kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebesar 42,30 persen, diikuti Kabupaten Sleman sebesar 50,03 persen, dan diikuti Kabupaten Bantul sebesar 52,75 persen. Sebaliknya daerah yang memiliki proporsi belanja tidak langsung terbesar adalah Kabupaten Gunungkidul dengan 60,76 persen terhadap realisasi belanja daerahnya.

**Tabel 10**  
**Persentase Belanja Tidak Langsung terhadap Realisasi Pendapatan**  
**Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2014 – 2018**

Pemerintah Daerah	2014	2015	2016	2017	2018	Perkembangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
D.I.Yogyakarta	52,34	53,26	51,26	50,48	48,59	-3,75
Kab. Kulon Progo	65,44	64,12	65,12	56,90	50,82	-14,62
Kab. Bantul	57,55	60,42	63,28	53,51	51,28	-6,27
Kab. Gunungkidul	69,02	66,40	68,83	58,45	58,19	-10,83
Kab. Sleman	57,73	56,60	59,29	49,69	47,58	-10,15
Kota Yogyakarta	49,52	50,49	49,72	35,62	40,25	-9,27

Pada Tahun 2018 persentase belanja tidak langsung terhadap realisasi pendapatan secara umum mengalami penurunan. Penurunan tertinggi dalam lima tahun terakhir terjadi di Kabupaten Kulon Progo sebesar 14,62 persen, sedangkan penurunan terendah terjadi di Kabupaten Bantul sebesar 6,27 persen. Untuk Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta juga mengalami penurunan sebesar 3,75 persen.

Adapun persentase rencana belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap rencana belanja pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 11.

**Tabel 11**  
**Rencana Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pemerintah Daerah**  
**di Daerah Istimewa Yogyakarta 2019**

Pemerintah Daerah	Rencana Belanja Tidak Langsung (Juta Rp.)	Persentase thd Total Rencana Belanja Daerah	Rencana Belanja Langsung (Juta Rp.)	Persentase thd Total Rencana Belanja Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
D.I.Yogyakarta	3.186.738	53,39	2.781.935	46,61
Kab. Kulon Progo	877.736	51,28	834.015	48,72
Kab. Bantul	1.267.959	53,20	1.115.399	46,80
Kab. Gunungkidul	1.221.317	53,77	1.050.017	46,23
Kab. Sleman	1.506.723	53,79	1.294.162	46,21
Kota Yogyakarta	771.297	41,56	1.084.720	58,44

Pada tabel 12 dapat dilihat bahwa realisasi belanja menurut fungsinya hampir semua Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagian besar mengalokasikan untuk anggaran sektor pendidikan yang bisa dilihat dari persentase belanja di sektor pendidikan yang paling tinggi dibanding sektor lainnya. Hal ini menunjukkan komitmen dari pemerintah daerah untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada penduduknya. Sektor yang memperoleh anggaran besar selanjutnya adalah sektor pelayanan umum, sektor kesehatan, dan sektor perumahan & fasilitas umum.

Berbeda dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, sektor kesehatan belum memperoleh porsi anggaran yang tinggi untuk Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa. Anggaran terbesar untuk Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibelanjakan untuk sektor pelayanan umum, sektor pendidikan, dan lingkungan hidup.

**Tabel 12**  
**Persentase Realisasi Belanja Menurut Fungsinya**  
**di Daerah Istimewa Yogyakarta 2018**

Fungsi Belanja	Provinsi DIY	Kab Kulon progo	Kab Bantul	Kab Gunung kidul	Kab Sleman	Kota Yogyakarta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pelayanan Umum	38,20	24,60	11,66	28,41	33,48	24,64
2. Ketertiban dan Keamanan	0,94	0,71	1,00	0,74	1,03	2,29
3. Ekonomi	7,35	5,71	23,80	4,65	5,67	10,07
4. Lingkungan Hidup	11,36	0,67	2,09	3,59	1,61	7,55
5. Perumahan dan Fasilitas Umum	7,62	10,41	7,45	9,86	12,98	8,94
6. Kesehatan	2,79	25,08	19,18	13,10	14,31	19,26
7. Pariwisata dan Budaya	6,85	0,92	1,15	1,13	1,16	2,15
8. Pendidikan	23,83	31,07	32,01	37,41	28,51	23,62
9. Perlindungan Sosial	1,06	0,84	1,67	1,10	1,23	1,48
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Rencana prioritas belanja pada tahun anggaran 2019 tidak banyak berubah dibanding realisasi belanja tahun 2018. Hal ini terlihat dari besarnya persentase masing-masing sektor belanja yang tidak jauh berbeda dibanding realisasi anggaran tahun sebelumnya. Pada rencana anggaran pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, sektor pendidikan, pelayanan umum, kesehatan dan sektor perumahan dan fasilitas umum masih mendapatkan porsi belanja yang lebih besar dibanding sektor lainnya.

Sedangkan pada Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta porsi belanja yang paling besar masih pada sektor pelayanan umum, diikuti sektor pendidikan dan lingkungan hidup. Persentase besarnya rencana belanja anggaran Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 13 di bawah ini.

**Tabel 13**  
**Persentase Rencana Belanja Menurut Fungsinya di Daerah Istimewa Yogyakarta**  
**2019**

Fungsi Belanja	Provinsi DIY	Kab Kulon progo	Kab Bantul	Kab Gunung kidul	Kab Sleman	Kota Yogyakarta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pelayanan Umum	45,78	24,56	15,94	31,23	36,21	25,20
2. Ketertiban dan Keamanan	2,02	2,83	3,95	4,22	1,15	2,72
3. Ekonomi	3,74	4,80	23,60	3,76	5,17	10,74
4. Lingkungan Hidup	10,66	0,95	1,62	2,22	1,94	3,32
5. Perumahan dan Fasilitas Umum	4,84	11,59	8,27	7,38	13,55	12,44
6. Kesehatan	2,86	22,55	16,79	14,37	13,81	17,85
7. Pariwisata dan Budaya	6,68	1,72	1,38	4,05	1,21	2,26
8. Pendidikan	22,32	30,32	27,65	31,89	25,90	23,89
9. Perlindungan Sosial	1,10	0,69	0,78	0,86	1,06	1,59
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



# Lampiran Tabel



Lampiran  
Tabel

<https://yogyakarta.bps.go.id>



**Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2018 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>5.443.552.201</b>	<b>100,00</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah	2.041.096.405	37,50
1.2	Dana Perimbangan	2.317.436.811	42,57
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	1.085.018.985	19,93
<b>II</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>5.303.450.939</b>	<b>100,00</b>
2.1	Belanja Tidak Langsung	2.644.923.258	49,87
2.2	Belanja Langsung	2.658.527.681	50,13
Surplus		140.101.262	
Pembayaran Netto		325.018.633	

**Tabel 1.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2018 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>2.041.096.405</b>	<b>37,50</b>
1.1	Pajak Daerah	1.717.291.718	31,55
1.2	Retribusi Daerah	43.625.223	0,80
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	85.097.738	1,56
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	195.081.726	3,58
<b>II</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>2.317.436.811</b>	<b>42,57</b>
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	93.142.565	1,71
2.2	Dana Alokasi Umum	1.314.262.108	24,14
2.3	Dana Alokasi Khusus	910.032.138	16,72
<b>III</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>1.085.018.985</b>	<b>19,93</b>
<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>		<b>5.443.552.201</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 1.3 Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2018 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>2.644.923.258</b>	<b>49,87</b>
1.1	Belanja Pegawai	1.285.055.475	24,23
1.2	Belanja Bunga	0	0,00
1.3	Belanja Subsidi	0	0,00
1.4	Belanja Hibah	587.035.546	11,07
1.5	Belanja Bantuan Sosial	450.000	0,01
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	692.463.991	13,06
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	79.918.246	1,51
1.8	Belanja Tidak Terduga	0	0,00
<b>II</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>2.658.527.681</b>	<b>50,13</b>
2.1	Belanja Pegawai	227.827.625	4,30
2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.295.737.440	24,43
2.3	Belanja Modal	1.134.962.616	21,40
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>		<b>5.303.450.939</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 1.4 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2018 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	2.025.942.492	38,20
2	Ketertiban dan Keamanan	50.002.877	0,94
3	Ekonomi	389.680.274	7,35
4	Lingkungan Hidup	602.474.262	11,36
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	404.021.272	7,62
6	Kesehatan	148.223.782	2,79
7	Pariwisata dan Budaya	363.024.167	6,85
8	Pendidikan	1.263.998.103	23,83
9	Perlindungan Sosial	56.083.897	1,06
<b>Jumlah Belanja Menurut Fungsi</b>		<b>5.303.451.126</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 1.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2019 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>5.663.778.508</b>	<b>100,00</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1.921.564.732	33,93
1.2	Dana Perimbangan	2.474.160.842	43,68
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	1.268.052.934	22,39
II	<b>Belanja Daerah</b>	<b>5.968.673.018</b>	<b>100,00</b>
2.1	Belanja Tidak Langsung	3.186.737.953	53,39
2.2	Belanja Langsung	2.781.935.065	46,61
	Surplus	(304.894.510)	
	Pembayaran Netto	304.894.502	

**Tabel 1.6 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2019 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>1.921.564.732</b>	<b>33,93</b>
1.1	Pajak Daerah	1.720.036.541	30,37
1.2	Retribusi Daerah	33.288.220	0,59
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	85.874.687	1,52
1.4	Lain –lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	82.365.284	1,45
<b>II</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>2.474.160.842</b>	<b>43,68</b>
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	89.553.564	1,58
2.2	Dana Alokasi Umum	1.351.102.020	23,86
2.3	Dana Alokasi Khusus	1.033.505.258	18,25
<b>III</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>1.268.052.934</b>	<b>22,39</b>
<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>		<b>5.663.778.508</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 1.7 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2019 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>3.186.737.953</b>	<b>53,39</b>
1.1	Belanja Pegawai	1.416.494.423	23,73
1.2	Belanja Bunga	0	0
1.3	Belanja Subsidi	81.100.524	1,35877
1.4	Belanja Hibah	671.906.017	11,26
1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.402.000	0,02
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	704.917.368	11,81
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	288.285.077	4,83
1.8	Belanja Tidak Terduga	22.632.544	0,38
<b>II</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>2.781.935.065</b>	<b>46,61</b>
2.1	Belanja Pegawai	292.934.142	4,91
2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.341.878.366	22,48
2.3	Belanja Modal	1.147.122.557	19,22
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>		<b>5.968.673.018</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 1.8 Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2019 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	2.732.462.426	45,78
2	Ketertiban dan Keamanan	120.324.864	2,02
3	Ekonomi	223.402.756	3,74
4	Lingkungan Hidup	636.334.669	10,66
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	289.000.208	4,84
6	Kesehatan	170.818.953	2,86
7	Pariwisata dan Budaya	398.465.312	6,68
8	Pendidikan	1.332.163.637	22,32
9	Perlindungan Sosial	65.700.184	1,10
<b>Jumlah Belanja Menurut Fungsi</b>		<b>5.968.673.009</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 2.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2018 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>1.559.832.133</b>	<b>100,00</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah	211.047.699	13,53
1.2	Dana Perimbangan	973.566.098	62,41
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	375.218.336	24,06
<b>II</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>1.481.008.335</b>	<b>100,00</b>
2.1	Belanja Tidak Langsung	792.780.442	53,53
2.2	Belanja Langsung	688.227.893	46,47
Surplus		78.823.798	
Pembayaran Netto		40.162.360	

**Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2018 (000Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
I	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>211.047.699</b>	<b>13,53</b>
1.1	Pajak Daerah	59.412.848	3,81
1.2	Retribusi Daerah	9.488.343	0,61
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.475.590	0,93
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	127.670.918	8,18
II	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>973.566.098</b>	<b>86,47</b>
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	19.814.049	1,27
2.2	Dana Alokasi Umum	705.868.940	45,25
2.3	Dana Alokasi Khusus	247.883.109	15,89
III	<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>375.218.336</b>	<b>24,06</b>
	<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>	<b>1.559.832.133</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 2.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2018 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>792.780.442</b>	<b>53,53</b>
1.1	Belanja Pegawai	592.498.793	40,01
1.2	Belanja Bunga	362.173	0,02
1.3	Belanja Subsidi	0	0,00
1.4	Belanja Hibah	23.611.461	1,59
1.5	Belanja Bantuan Sosial	20.518.400	1,39
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	4.004.688	0,27
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	151.617.652	10,24
1.8	Belanja Tidak Terduga	167.275	0,01
<b>II</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>688.227.893</b>	<b>46,47</b>
2.1	Belanja Pegawai	34.857.359	2,35
2.2	Belanja Barang dan Jasa	312.876.148	21,13
2.3	Belanja Modal	340.494.386	22,99
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>		<b>1.481.008.335</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 2.4 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2018 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	364.293.243	24,60
2	Ketertiban dan Keamanan	10.473.628	0,71
3	Ekonomi	84.614.631	5,71
4	Lingkungan Hidup	9.902.231	0,67
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	154.162.232	10,41
6	Kesehatan	371.368.822	25,08
7	Pariwisata dan Budaya	13.625.816	0,92
8	Pendidikan	460.156.049	31,07
9	Perlindungan Sosial	12.411.683	0,84
<b>Jumlah Belanja Menurut Fungsi</b>		<b>1.481.008.335</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 2.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2019 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>1.674.615.738</b>	<b>100,00</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah	226.191.393	13,51
1.2	Dana Perimbangan	1.066.298.354	63,67
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	382.125.991	22,82
<b>II</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>1.711.750.557</b>	<b>100,00</b>
2.1	Belanja Tidak Langsung	877.735.506	51,28
2.2	Belanja Langsung	834.015.051	48,72
Surplus		(37.134.819)	
Pembiayaan Netto		37.134.819	

**Tabel 2.6 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2019 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>226.191.393</b>	<b>13,51</b>
1.1	Pajak Daerah	63.774.990	3,81
1.2	Retribusi Daerah	10.294.356	0,61
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.002.554	0,96
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	136.119.493	8,13
<b>II</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.066.298.354</b>	<b>63,67</b>
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	20.583.108	1,23
2.2	Dana Alokasi Umum	727.019.748	43,41
2.3	Dana Alokasi Khusus	318.695.498	19,03
<b>III</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>382.125.991</b>	<b>22,82</b>
<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>		<b>1.674.615.738</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 2.7 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2019  
(000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>877.735.506</b>	<b>51,28</b>
1.1	Belanja Pegawai	655.345.362	38,29
1.2	Belanja Bunga	315.134	0,02
1.3	Belanja Subsidi	0	0,00
1.4	Belanja Hibah	27.027.225	1,58
1.5	Belanja Bantuan Sosial	18.650.700	1,09
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	7.406.936	0,43
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	165.971.273	9,70
1.8	Belanja Tidak Terduga	3.018.876	0,18
<b>II</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>834.015.051</b>	<b>48,72</b>
2.1	Belanja Pegawai	57.904.444	3,38
2.2	Belanja Barang dan Jasa	338.617.148	19,78
2.3	Belanja Modal	437.493.459	25,56
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>		<b>1.711.750.557</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 2.8 Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2019 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	420.328.089	24,56
2	Ketertiban dan Keamanan	48.393.601	2,83
3	Ekonomi	82.216.240	4,80
4	Lingkungan Hidup	16.212.762	0,95
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	198.352.379	11,59
6	Kesehatan	386.054.400	22,55
7	Pariwisata dan Budaya	29.373.144	1,72
8	Pendidikan	519.034.517	30,32
9	Perlindungan Sosial	11.785.425	0,69
<b>Jumlah Belanja Menurut Fungsi</b>		<b>1.711.750.557</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul 2018  
(000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>2.227.752.027</b>	<b>100,00</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah	462.653.956	20,77
1.2	Dana Perimbangan	1.355.455.930	60,84
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	409.642.141	18,39
<b>II</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>2.165.651.760</b>	<b>100,00</b>
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.142.422.667	52,75
2.2	Belanja Langsung	1.023.229.093	47,25
Surplus		62.100.267	
Pembayaran Netto		217.057.982	

**Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul 2018 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>462.653.956</b>	<b>20,77</b>
1.1	Pajak Daerah	182.127.310	8,18
1.2	Retribusi Daerah	46.052.620	2,07
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.652.872	0,88
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli yang Sah	214.821.154	9,64
<b>II</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.355.455.930</b>	<b>60,84</b>
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	30.584.172	1,37
2.2	Dana Alokasi Umum	982.250.842	44,09
2.3	Dana Alokasi Khusus	342.620.916	15,38
<b>III</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>409.642.141</b>	<b>18,39</b>
<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>		<b>2.227.752.027</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 3.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul 2018 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.142.422.667</b>	<b>52,75</b>
1.1	Belanja Pegawai	826.969.449	38,19
1.2	Belanja Bunga	0	0,00
1.3	Belanja Subsidi	0	0,00
1.4	Belanja Hibah	44.796.020	2,07
1.5	Belanja Bantuan Sosial	7.852.092	0,36
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	17.798.976	0,82
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	244.600.587	11,29
1.8	Belanja Tidak Terduga	405.543	0,02
<b>II</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.023.229.093</b>	<b>47,25</b>
2.1	Belanja Pegawai	93.830.065	4,33
2.2	Belanja Barang dan Jasa	591.238.915	27,30
2.3	Belanja Modal	338.160.113	15,61
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>		<b>2.165.651.760</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 3.4 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Bantul 2018 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	254.024.176	11,73
2	Ketertiban dan Keamanan	21.719.853	1,00
3	Ekonomi	518.506.490	23,94
4	Lingkungan Hidup	45.457.170	2,10
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	162.337.604	7,50
6	Kesehatan	417.936.943	19,30
7	Pariwisata dan Budaya	25.059.234	1,16
8	Pendidikan	697.493.077	32,21
9	Perlindungan Sosial	23.117.213	1,07
<b>Jumlah Belanja Menurut Fungsi</b>		<b>2.165.651.760</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 3.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul 2019 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>2.156.590.131</b>	<b>100,00</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah	448.854.251	20,81
1.2	Dana Perimbangan	1.380.211.771	64,00
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	327.524.109	15,19
<b>II</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>2.383.358.029</b>	<b>100,00</b>
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.267.958.570	53,20
2.2	Belanja Langsung	1.115.399.458	46,80
Surplus		(226.767.897)	
Pembayaran Netto		226.767.897	

**Tabel 3.6 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul 2019 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>448.854.251</b>	<b>20,81</b>
1.1	Pajak Daerah	181.715.500	8,43
1.2	Retribusi Daerah	41.180.011	1,91
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.707.167	1,01
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	204.251.573	9,47
<b>II</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.380.211.771</b>	<b>64,00</b>
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	28.641.800	1,33
2.2	Dana Alokasi Umum	1.009.528.274	46,81
2.3	Dana Alokasi Khusus	342.041.697	15,86
<b>III</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>327.524.109</b>	<b>15,19</b>
<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>		<b>2.156.590.131</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 3.7 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul 2019 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.267.958.570</b>	<b>53,20</b>
1.1	Belanja Pegawai	898.949.971	37,72
1.2	Belanja Bunga	0	0,00
1.3	Belanja Subsidi	0	0,00
1.4	Belanja Hibah	64.954.138	2,73
1.5	Belanja Bantuan Sosial	9.047.520	0,38
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	22.290.550	0,94
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	256.814.876	10,78
1.8	Belanja Tidak Terduga	15.901.515	0,67
<b>II</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.115.399.458</b>	<b>46,80</b>
2.1	Belanja Pegawai	112.098.211	4,70
2.2	Belanja Barang dan Jasa	618.526.482	25,95
2.3	Belanja Modal	384.774.765	16,14
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>		<b>2.383.358.028</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 3.8 Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Bantul 2019 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	379.954.884	15,94
2	Ketertiban dan Keamanan	94.256.924	3,95
3	Ekonomi	562.573.171	23,60
4	Lingkungan Hidup	38.689.603	1,62
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	197.122.360	8,27
6	Kesehatan	400.199.379	16,79
7	Pariwisata dan Budaya	32.903.316	1,38
8	Pendidikan	658.955.155	27,65
9	Perlindungan Sosial	18.703.235	0,78
<b>Jumlah Belanja Menurut Fungsi</b>		<b>2.383.358.027</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 4.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2018 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>1.851.209.930</b>	<b>100,00</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah	227.299.980	12,28
1.2	Dana Perimbangan	1.273.791.667	68,81
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	350.118.283	18,91
<b>II</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>1.772.887.365</b>	<b>100,00</b>
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.077.272.551	60,76
2.2	Belanja Langsung	695.614.814	39,24
Surplus		78.322.565	
Pembayaran Netto		146.880.522	

**Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2018 (000Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>227.299.980</b>	<b>12,28</b>
1.1	Pajak Daerah	51.299.015	2,77
1.2	Retribusi Daerah	33.396.374	1,80
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.373.326	0,78
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	128.231.265	6,93
<b>II</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.273.791.667</b>	<b>68,81</b>
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	22.706.651	1,23
2.2	Dana Alokasi Umum	938.221.136	50,68
2.3	Dana Alokasi Khusus	312.863.880	16,90
<b>III</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>350.118.283</b>	<b>18,91</b>
<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>		<b>1.851.209.930</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 4.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2018 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.077.272.551</b>	<b>60,76</b>
1.1	Belanja Pegawai	821.080.583	46,31
1.2	Belanja Bunga	0	0,00
1.3	Belanja Subsidi	0	0,00
1.4	Belanja Hibah	19.599.137	1,11
1.5	Belanja Bantuan Sosial	762.100	0,04
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	11.075.381	0,62
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	219.837.276	12,40
1.8	Belanja Tidak Terduga	4.918.074	0,28
<b>II</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>695.614.814</b>	<b>39,24</b>
2.1	Belanja Pegawai	41.719.684	2,35
2.2	Belanja Barang dan Jasa	348.479.175	19,66
2.3	Belanja Modal	305.415.955	17,23
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>		<b>1.772.887.365</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 4.4 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2018 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	503.721.226	28,41
2	Ketertiban dan Keamanan	13.181.682	0,74
3	Ekonomi	82.401.693	4,65
4	Lingkungan Hidup	63.705.975	3,59
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	174.841.031	9,86
6	Kesehatan	232.208.994	13,10
7	Pariwisata dan Budaya	20.119.109	1,13
8	Pendidikan	663.195.809	37,41
9	Perlindungan Sosial	19.511.846	1,10
<b>Jumlah Belanja Menurut Fungsi</b>		<b>1.772.887.365</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 4.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2019 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>2.057.526.416</b>	<b>100,00</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah	228.329.250	11,10
1.2	Dana Perimbangan	1.367.360.517	66,46
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	461.836.649	22,45
<b>II</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>2.271.333.958</b>	<b>100,00</b>
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.221.317.119	53,77
2.2	Belanja Langsung	1.050.016.839	46,23
Surplus		(213.807.542)	
Pembiayaan Netto		213.807.543	

**Tabel 4.6 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2019 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>228.329.250</b>	<b>11,10</b>
1.1	Pajak Daerah	48.357.650	2,35
1.2	Retribusi Daerah	36.966.039	1,80
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.626.002	0,71
1.4	Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	128.379.559	6,24
<b>II</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.367.360.517</b>	<b>66,46</b>
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	23.013.265	1,12
2.2	Dana Alokasi Umum	965.080.463	46,90
2.3	Dana Alokasi Khusus	379.266.789	18,43
<b>III</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>461.836.649</b>	<b>22,45</b>
<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>		<b>2.057.526.416</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 4.7 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2019  
(000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.221.317.119</b>	<b>53,77</b>
1.1	Belanja Pegawai	921.703.110	40,58
1.2	Belanja Bunga	0	0,00
1.3	Belanja Subsidi	0	0,00
1.4	Belanja Hibah	24.469.040	1,08
1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.300.000	0,06
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	10.748.641	0,47
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	260.096.328	11,45
1.8	Belanja Tidak Terduga	3.000.000	0,13
<b>II</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.050.016.839</b>	<b>46,23</b>
2.1	Belanja Pegawai	44.672.078	1,97
2.2	Belanja Barang dan Jasa	446.914.255	19,68
2.3	Belanja Modal	558.430.506	24,59
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>		<b>2.271.333.958</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 4.8 Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2019 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	709.278.092	31,23
2	Ketertiban dan Keamanan	95.958.471	4,22
3	Ekonomi	85.439.789	3,76
4	Lingkungan Hidup	50.485.771	2,22
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	167.703.351	7,38
6	Kesehatan	326.439.663	14,37
7	Pariwisata dan Budaya	92.033.202	4,05
8	Pendidikan	724.386.943	31,89
9	Perlindungan Sosial	19.608.676	0,86
<b>Jumlah Belanja Menurut Fungsi</b>		<b>2.271.333.958</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 5.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman 2018  
(000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>2.712.794.080</b>	<b>100,00</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah	894.272.961	32,97
1.2	Dana Perimbangan	1.368.717.994	50,45
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	449.803.125	16,58
<b>II</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>2.580.093.718</b>	<b>100,00</b>
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.290.867.655	50,03
2.2	Belanja Langsung	1.289.226.063	49,97
Surplus		132.700.362	
Pembayaran Netto		270.342.204	

**Tabel 5.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman 2018 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>894.272.961</b>	<b>32,97</b>
1.1	Pajak Daerah	596.559.264	21,99
1.2	Retribusi Daerah	47.760.997	1,76
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	34.654.443	1,28
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	215.298.257	7,94
<b>II</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.368.717.994</b>	<b>50,45</b>
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	50.685.432	1,87
2.2	Dana Alokasi Umum	996.492.454	36,73
2.3	Dana Alokasi Khusus	321.540.108	11,85
<b>III</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>449.803.125</b>	<b>16,58</b>
<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>		<b>2.712.794.080</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 5.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman 2018 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.290.867.655</b>	<b>50,03</b>
1.1	Belanja Pegawai	925.330.431	35,86
1.2	Belanja Bunga	1.574.099	0,06
1.3	Belanja Subsidi	0	0,00
1.4	Belanja Hibah	52.751.833	2,04
1.5	Belanja Bantuan Sosial	29.112.938	1,13
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	61.204.231	2,37
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	220.758.431	8,56
1.8	Belanja Tidak Terduga	135.692	0,01
<b>II</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.289.226.063</b>	<b>49,97</b>
2.1	Belanja Pegawai	211.105.893	8,18
2.2	Belanja Barang dan Jasa	666.807.765	25,84
2.3	Belanja Modal	411.312.405	15,94
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>		<b>2.580.093.718</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 5.4 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Sleman 2018  
(000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	863.794.467	33,48
2	Ketertiban dan Keamanan	26.667.007	1,03
3	Ekonomi	146.394.163	5,67
4	Lingkungan Hidup	41.602.089	1,61
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	334.937.746	12,98
6	Kesehatan	369.324.136	14,31
7	Pariwisata dan Budaya	29.948.527	1,16
8	Pendidikan	735.681.465	28,51
9	Perlindungan Sosial	31.744.117	1,23
<b>Jumlah Belanja Menurut Fungsi</b>		<b>2.580.093.717</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 5.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman 2019 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>2.682.185.885</b>	<b>100,00</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah	867.643.470	32,35
1.2	Dana Perimbangan	1.411.921.108	52,64
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	402.621.307	15,01
<b>II</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>2.800.885.085</b>	<b>100,00</b>
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.506.722.610	53,79
2.2	Belanja Langsung	1.294.162.475	46,21
Surplus		(118.699.200)	
Pembayaran Netto		118.699.201	

**Tabel 5.6 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman 2019  
(000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>867.643.470</b>	<b>32,35</b>
1.1	Pajak Daerah	581.800.000	21,69
1.2	Retribusi Daerah	43.669.694	1,63
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	38.579.264	1,44
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	203.594.512	7,59
<b>II</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.411.921.108</b>	<b>52,64</b>
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	50.014.153	1,86
2.2	Dana Alokasi Umum	1.026.081.409	38,26
2.3	Dana Alokasi Khusus	335.825.546	12,52
<b>III</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>402.621.307</b>	<b>15,01</b>
<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>		<b>2.682.185.885</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 5.7 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman 2019 (000Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.506.722.610</b>	<b>53,79</b>
1.1	Belanja Pegawai	1.063.232.351	37,96
1.2	Belanja Bunga	1.870.801	0,07
1.3	Belanja Subsidi	0	0,00
1.4	Belanja Hibah	68.669.600	2,45
1.5	Belanja Bantuan Sosial	22.209.667	0,79
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	62.545.217	2,23
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	268.544.031	9,59
1.8	Belanja Tidak Terduga	19.650.943	0,70
<b>II</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.294.162.475</b>	<b>46,21</b>
2.1	Belanja Pegawai	201.747.887	7,20
2.2	Belanja Barang dan Jasa	670.931.907	23,95
2.3	Belanja Modal	421.482.681	15,05
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>		<b>2.800.885.085</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 5.8 Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Sleman 2019 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	1.014.083.768	36,21
2	Ketertiban dan Keamanan	32.348.599	1,15
3	Ekonomi	144.691.635	5,17
4	Lingkungan Hidup	54.374.734	1,94
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	379.411.602	13,55
6	Kesehatan	386.874.890	13,81
7	Pariwisata dan Budaya	33.837.139	1,21
8	Pendidikan	725.516.096	25,90
9	Perlindungan Sosial	29.746.622	1,06
<b>Jumlah Belanja Menurut Fungsi</b>		<b>2.800.885.085</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 6.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta 2018  
(000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>1.736.919.998</b>	<b>100,00</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah	667.493.075	38,43
1.2	Dana Perimbangan	867.706.456	49,96
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	201.720.467	11,61
<b>II</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>1.652.727.844</b>	<b>100,00</b>
2.1	Belanja Tidak Langsung	699.175.723	42,30
2.2	Belanja Langsung	953.552.121	57,70
Surplus		84.192.154	
Pembayaran Netto		142.250.170	

**Tabel 6.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta 2018 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>667.493.075</b>	<b>38,43</b>
1.1	Pajak Daerah	407.573.263	23,47
1.2	Retribusi Daerah	33.984.532	1,96
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28.032.365	1,61
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	197.902.915	11,39
<b>II</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>867.706.456</b>	<b>49,96</b>
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	46.678.380	2,69
2.2	Dana Alokasi Umum	658.504.186	37,91
2.3	Dana Alokasi Khusus	162.523.890	9,36
<b>III</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>201.720.467</b>	<b>11,61</b>
<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>		<b>1.736.919.998</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 6.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta 2018 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>699.175.723</b>	<b>42,30</b>
1.1	Belanja Pegawai	635.124.321	38,43
1.2	Belanja Bunga	0	0,00
1.3	Belanja Subsidi	0	0,00
1.4	Belanja Hibah	53.665.425	3,25
1.5	Belanja Bantuan Sosial	7.764.735	0,47
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	0	0,00
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	2.328.001	0,14
1.8	Belanja Tidak Terduga	293.241	0,02
<b>II</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>953.552.121</b>	<b>57,70</b>
2.1	Belanja Pegawai	132.107.388	7,99
2.2	Belanja Barang dan Jasa	496.351.994	30,03
2.3	Belanja Modal	325.092.739	19,67
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>		<b>1.652.727.844</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 6.4 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kota Yogyakarta 2018 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	407.258.770	24,64
2	Ketertiban dan Keamanan	37.861.030	2,29
3	Ekonomi	166.499.945	10,07
4	Lingkungan Hidup	124.748.154	7,55
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	147.721.370	8,94
6	Kesehatan	318.371.347	19,26
7	Pariwisata dan Budaya	35.501.539	2,15
8	Pendidikan	390.351.945	23,62
9	Perlindungan Sosial	24.413.744	1,48
<b>Jumlah Belanja Menurut Fungsi</b>		<b>1.652.727.844</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 6.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta 2019 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>1.725.609.408</b>	<b>100,00</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah	636.084.388	36,86
1.2	Dana Perimbangan	907.202.077	52,57
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	182.322.943	10,57
<b>II</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>1.856.017.020</b>	<b>100,00</b>
2.1	Belanja Tidak Langsung	771.296.856	41,56
2.2	Belanja Langsung	1.084.720.164	58,44
Surplus		(130.407.612)	
Pembiayaan Netto		130.407.612	

**Tabel 6.6 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta 2019 (000Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>636.084.388</b>	<b>36,86</b>
1.1	Pajak Daerah	420.731.500	24,38
1.2	Retribusi Daerah	33.621.960	1,95
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28.588.900	1,66
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	153.142.028	8,87
<b>II</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>907.202.077</b>	<b>52,57</b>
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	44.674.643	2,59
2.2	Dana Alokasi Umum	691.457.574	40,07
2.3	Dana Alokasi Khusus	171.069.860	9,91
<b>III</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>182.322.943</b>	<b>10,57</b>
<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>		<b>1.725.609.408</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 6.7 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta 2019 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>771.296.856</b>	<b>41,56</b>
1.1	Belanja Pegawai	661.041.084	35,62
1.2	Belanja Bunga	0	0,00
1.3	Belanja Subsidi	0	0,00
1.4	Belanja Hibah	89.293.099	4,81
1.5	Belanja Bantuan Sosial	15.498.800	0,84
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	0	0,00
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	1.963.873	0,11
1.8	Belanja Tidak Terduga	3.500.000	0,19
<b>II</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.084.720.164</b>	<b>58,44</b>
2.1	Belanja Pegawai	151.997.578	8,19
2.2	Belanja Barang dan Jasa	624.674.618	33,66
2.3	Belanja Modal	308.047.968	16,60
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>		<b>1.856.017.020</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 6.8 Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kota Yogyakarta 2019 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	467.740.614	25,20
2	Ketertiban dan Keamanan	50.546.628	2,72
3	Ekonomi	199.312.267	10,74
4	Lingkungan Hidup	61.647.863	3,32
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	230.804.960	12,44
6	Kesehatan	331.271.541	17,85
7	Pariwisata dan Budaya	41.874.904	2,26
8	Pendidikan	443.362.271	23,89
9	Perlindungan Sosial	29.455.972	1,59
<b>Jumlah Belanja Menurut Fungsi</b>		<b>1.856.017.020</b>	<b>100,00</b>

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA

ISSN : 2598-2664



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**BPS - Statistics of Daerah Istimewa Yogyakarta Province**

Jl. Brawijaya, Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul 55183 - Telp. : (0274) 4342234  
Hunting, Fax. : (0274) 4342230 - E-mail : bps3400@bps.go.id Homepage : <http://yogyakarta.bps.go.id>



978-602-139-246-1